

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17
B Rekomendasi	

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan
Penjaminan Mutu

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

KEPALA BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU

HERU SANJOTO,SH,M.Si

Pembina

NIP. 19771021 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, dan pengendalian mutu dan kerjasama.

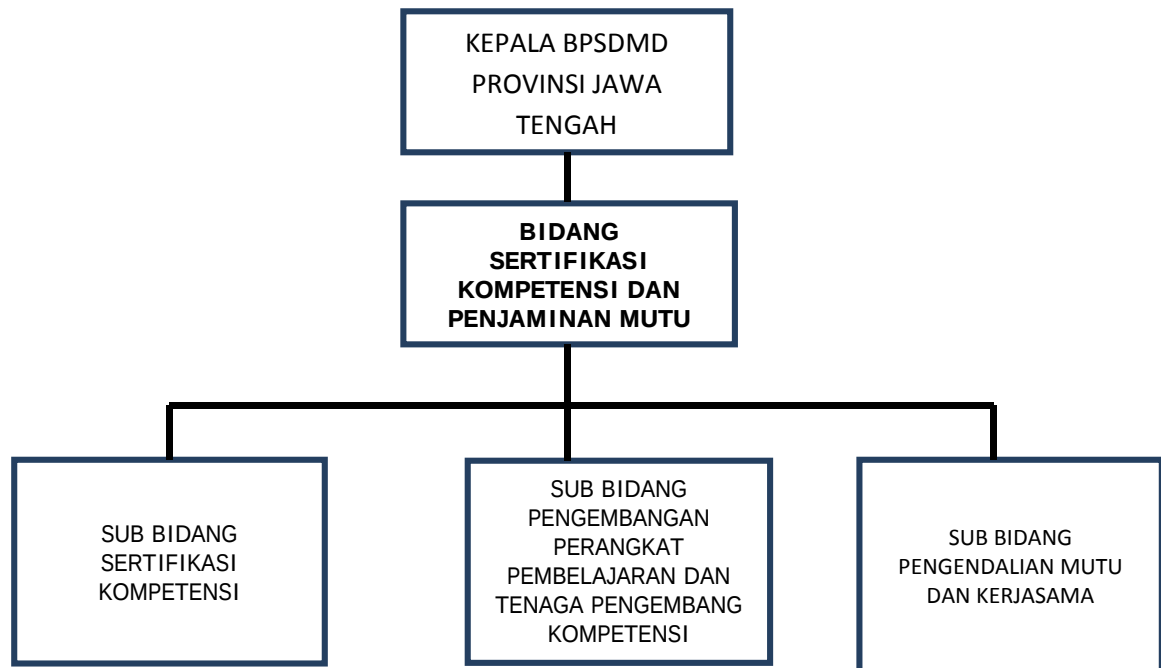
Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 15 tersebut, Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sertifikasi Kompetensi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi.
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerjasama;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu terdiri atas :

- a. Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
- b. Subbidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
- c. Subbidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama.

Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 2. Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat;
 3. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat;
 4. Kegiatan Reformasi Kediklatan;
 5. Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara.
- Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1.	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah : - Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Nesara	Jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensinya	280 orang	0	112 org	245 org	281 org	100,35 %
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : - Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	166 dok	109 dok	159 dok	193 dok	258 dok	155,42 %
3.	- Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	Jumlah Dokumen Pengkajian dan pengembangan diklat	83 dok	0 dok	48 dok	15 dok	20 dok	100 %
4	- Kegiatan Reformasi Kediklatan	Jumlah Dokumen Reformasi Kediklatan	4 dok	0	0	0	4 dok	100 %
5	- Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaswara	Jumlah dokumen Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaswara	8 dok	0	2 dok	4 dok	2 dok	100 %
Rata-rata capaian								132,8 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dari 2 program 5 kegiatan dengan indikator Persentase capaian sasaran kerja 132,8 % atau “ Sangat Baik “ dengan kategori “A “

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah : - Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara	606.563.000	519.407.940	85,63 %
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum : Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	919.635.000	797.002.769	86,67 %
3	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	786.673.000	749.817.650	95,32 %
4	Kegiatan Reformasi Kediklatan	273.645.000	206.499.400	75,46 %
5	Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaswara	526.412.000	446.214.641	84,77 %
Rata-rata penyerapan anggaran				85,57 %

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 3.112.928.000 terealisasi sebesar Rp. 2.718.42.400

dan Capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 393.985.600 atau 14,43 %

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Penyampaian laporan hasil evaluasi pra penyelenggaraan diklat, evaluasi tenaga pengajar dan evaluasi penyelenggaraan diklat kepada bidang, sekretariat dan widyaiswara.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan alumni diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ada di kabupaten/kota.
3. Melakukan rapat bulanan dengan Tim Komite Penjaminan Mutu Diklat.
4. Melakukan rapat bulanan terkait dengan pemeliharaan ISO 9001:2015
5. Melakukan konsultasi akreditasi lembaga diklat ke Kementerian / Lembaga Teknis yang terkait.
6. Melakukan pembahasan dengan Akademisi / Praktisi dalam penyusunan pedoman / petunjuk teknis.
7. Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Sertifikasi Kompetensi ASN;
8. Peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah terkait Uji Kompetensi yang efektif dan efisien dan terintegrasi
9. Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran sehingga dapat dilakukan penyelarasan.
10. Peningkatan peran Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu
11. Daerah Provinsi Tengah dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab bidang.
12. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 132,8 % dan anggaran sebesar 90,56 %, sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efieisiensi sebesar Rp. 393.985.600 atau 14,43 %.

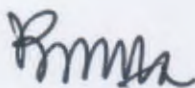
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Sertifikasi dan Penjaminan Mutu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan cipai.
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

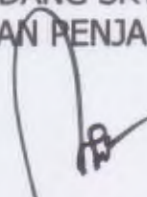
Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BPSDMD
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001

KEPALA BIDANG SRTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU



HERU SANJOTO, SH, M.SI
Pembina
NIP. 19771021 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	3
B Struktur Jabatan	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	7
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

KATA PENGANTAR

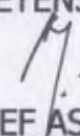
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS


ANDIK ARIEF ASYAFII, SH, MM

Pembina

NIP. 19651109 198703 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, dan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

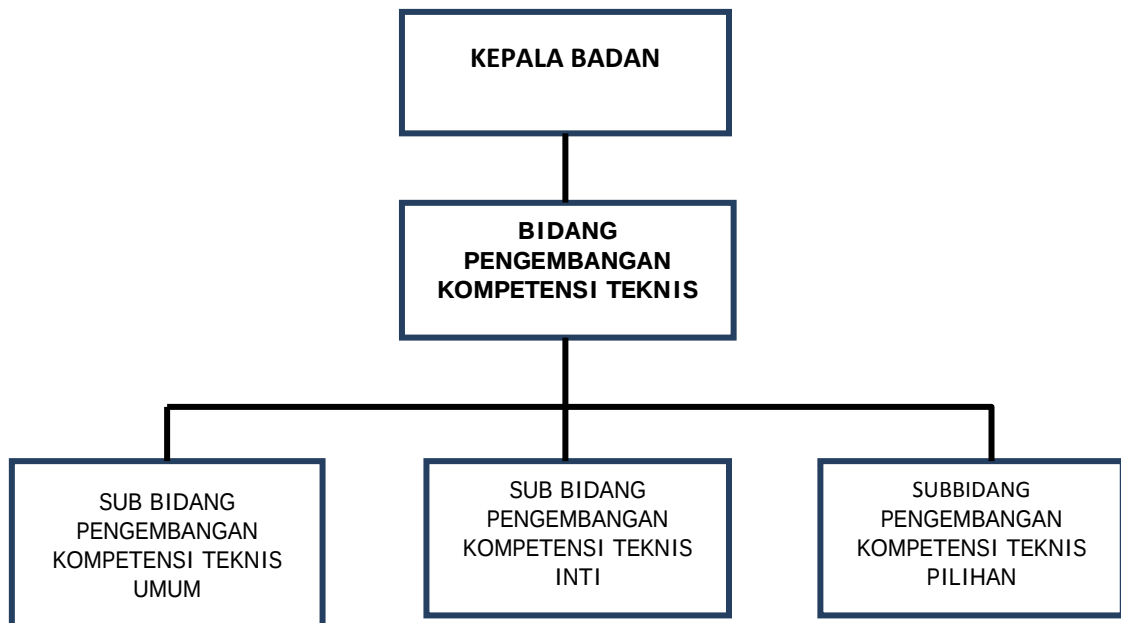
Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis inti;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis pilihan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
- b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan
- c. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.

Sub bidang - sub bidang sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 yaitu Jumlah ASN/PNS yang Lulus Diklat Teknis 1290 orang. Pada anggaran perubahan Tahun 2018 terdapat perubahan target kinerja menjadi 1372 orang.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian	
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Jumlah	%
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis	1.372	263	296	390	386	1.335	97,30 %
	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis	1.372	263	296	390	386	1.335	97,30 %
	<i>Rata-rata capaian</i>								97,30 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dari 1 program dengan indikator Jumlah ASN/PNS yang Lulus Diklat Teknis dicapai melalui 1 kegiatan dengan indikator Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis rata-rata capaian kinerjanya 97,67 % atau “Baik “ dengan kategori “B “ .

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	9.091.641.000	8.017.195.245	88,18
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah			
	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis			
Rata-rata penyerapan anggaran				88,18 %

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 9.091.641.000,00 terealisasi sebesar Rp. 8.017.195.245,00 atau 88,18 %. Capaian Kinerja sebesar 97,26 % sehingga penggunaan anggaran masih dalam kategori efektif sesuai dengan capaian kinerja.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Peningkatan kompetensi Widyaiswara sesuai dengan substansi;
3. Peningkatan kompetensi penyelenggara pelatihan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan;

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 97,67 % dan anggaran sebesar 88,18 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja masih dalam kategori efektif sesuai dengan capaian kinerja.

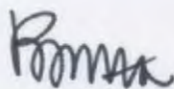
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis di tahun yang akan datang (Tahun 2019) adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan ciptai.
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001 h

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



ANDIK ARIEF ASYAFII, SH, MM
Pembina
NIP. 19651109 198703 1 010

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	2
DAFTAR ISI-----	
DAFTAR TABEL -----	
DAFTAR GAMBAR-----	
BAB I PENDAHULUAN -----	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan-----	3
B Struktur Jabatan-----	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN-----	9
A Perjanjian Kinerja-----	9
B Capaian Kinerja-----	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi-----	12
BAB III PENUTUP-----	17
A Kesimpulan -----	17
B Rekomendasi-----	

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Drs. DAVID BUDI HANTORO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610601 198810 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, sebagaimana gamabar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, terdiri atas :

- Subbidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
 - Subbidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional; dan
 - Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
- Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 dengan sasaran sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah :

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Fungsional :

- a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
- b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional
- c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah	Persentase capaian sasaran kerja pegawai	720 peserta (100%)	25%	38,19%	77,7%	109%	109%
	a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	a. Jumlah ASN/PNS yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional						
	b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional	b. Jumlah ASN/PNS yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional						
	c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	c. Jumlah ASN/PNS yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional						
	Rata-rata capaian							109 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dari 1 program dengan indikator Jumlah ASN/PNS yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, Jumlah ASN/PNS yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional, dan Jumlah ASN/PNS yang Lulus Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional melalui 3 (tiga) kegiatan rata-rata capaian kinerjanya adalah 109% atau " **Sangat Baik** " dengan kategori "A "

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah :	6.229.048.450,00	5.645.108.886,00	90,63%
	a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional			
	b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional			
	c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional			
		Rata-rata penyerapan anggaran		90,63%

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 6.229.048.450,00 terealisasi sebesar Rp. 5.645.108.886,00 dan Capaian Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 583.939.564,00 atau 9,37%

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

1. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pendidikan sebagai implikasi dari penyerahan urusan pendidikan menengah dan khusus di Pemprov Jateng berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan peran Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional melalui kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga Penyelenggara Diklat yang terakreditasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai **109 %** dan anggaran sebesar **90,63 %**, sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**" artinya capaian kinerja hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. **583.393.564,00** atau 9,37 %.

B. Rekomendasi

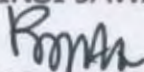
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dibidang pendidikan sebagai tindak lanjut dari pasca penyerahan urusan pendidikan menengah dan khusus kepada Provinsi.
2. Perlu pengembangan kompetensi SDM tenaga pengajar di bidang pendidikan sebagai salah satu syarat Lembaga Penyelenggara Diklat yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

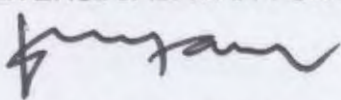
Semarang,

Mengetahui

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Drs. DAVID BUDI HANTORO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610601 198810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI-----	1
DAFTAR TABEL-----	2
DAFTAR GAMBAR-----	3
KATA PENGANTAR-----	4
BAB I PENDAHULUAN-----	5
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan-----	5
B Struktur Jabatan-----	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN-----	7
A Perjanjian Kinerja-----	7
B Capaian Kinerja-----	7
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi-----	9
BAB III PENUTUP-----	11
A Kesimpulan-----	11
B Rekomendasi-----	11

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja -----	7
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial -----	8
Tabel 2.3 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018 -----	9

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ----	6
--	---

KATA PENGANTAR

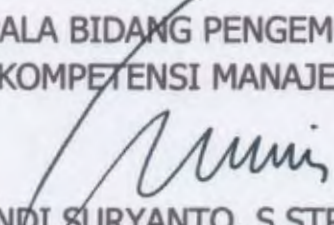
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Februari 2019
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si

Pembina (IV/a)
NIP. 19780410 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Tinggi dan Jabatan Administrator, dan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Dalam melaksanakan tugas tugas tersebut, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi pimpinan perangkat daerah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gamabar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri atas :

- a. Sub bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- b. Sub bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Tinggi dan Administrator; dan
- c. Sub bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan.

Sub bidang sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan
2. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah
3. Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan
4. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan dengan pem. Kab/Kota se Jateng

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program penyelenggaraan kepegawaian dan perangkat daerah							
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan	100% (600 orang)	0% (belum menyelenggarakan)	0% (belum menyelenggarakan)	63,33% (380 orang)	98% (588 orang)	98% (588 orang)
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	100% (150 orang)	20% (30 orang)	40% (60 orang)	80% (120 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	100% (1896 orang)	80,01% (1517 orang)	98,83% (1874 orang)	98,83% (1874 orang)	98,83% (1874 orang)	98,83% (1874 orang)
	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan dengan pem. Kab/Kota se jateng	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan	100% (52 angkatan)	109,61% (57 angkatan)	119,23% (62 angkatan)	125% (65 angkatan)	125% (65 angkatan)	125% (65 angkatan)
	Rata-rata capaian							105,45 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dari 1 program dicapai melalui 4 kegiatan dengan indikator Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan, Jumlah ASN/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah, Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dan Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan rata-rata capaian kinerjanya 105,45% atau kategori “Sangat Baik”.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel. 2.3

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	16.253.934.000	14.627.320.717	89,99%
1	Program penyelenggaraan kepegawaian dan perangkat daerah	16.253.934.000	14.627.320.717	89,99 %
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan	11.794.394.000	10.281.386.002	87,17%
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	1.313.260.000	1.241.741.746	94,55%
	Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan	3.016.280.000	2.975.526.600	98,64%
	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan dengan pem. Kab/Kota se jateng	130.000.000	128.666.369	98,97%
Rata-rata penyerapan anggaran				89,99%

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. **16.253.934.000,00** terealisasi sebesar Rp. **14.627.320.717,00** dan Capaian Kinerja hampir memenuhi target yang telah ditetapkan, dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. **1.626.613.283,00** atau **10,01 %**.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara/Kementerian/Provinsi luar Jawa Tengah / Kabupaten / Kota dalam dan luar Jawa Tengah terkait kepastian pengiriman calon peserta.
2. Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait waktu pemanggilan peserta diklat.
3. Peningkatan dan pelaksanaan perencanaan dalam program pelatihan melalui koordinasi dan sosialisasi secara komprehensif.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai **105,45%** dan anggaran sebesar **89,99%**, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja hampir memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp. **1.626.613.283,00** atau 10,01%.

B. Rekomendasi

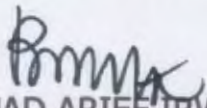
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan koordinasi lebih komprehensif dengan Lembaga Administrasi Negara selaku instansi pembina, Kementerian/Provinsi luar Jawa Tengah / Kabupaten / Kota dalam dan luar Jawa Tengah terkait kepastian pengiriman calon peserta.
2. Perlu dilakukan evaluasi terkait dengan pemanggilan calon peserta pelatihan dengan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah terkait waktu pemanggilan peserta pelatihan.

Semarang,

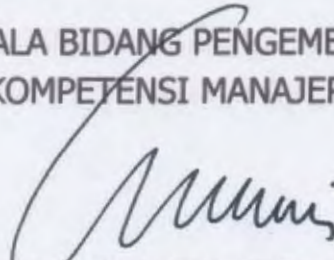
Mengetahui

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001 h

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL



ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19780410 199703 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi.....	12
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17
B Rekomendasi.....	
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Sekretaris	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

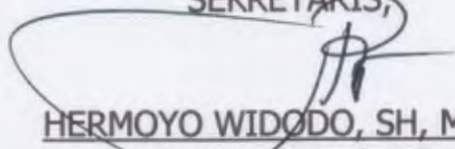
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di bidang kesekretariatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

SEKRETARIS,



HERMOYO WIDODO, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sekretariat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

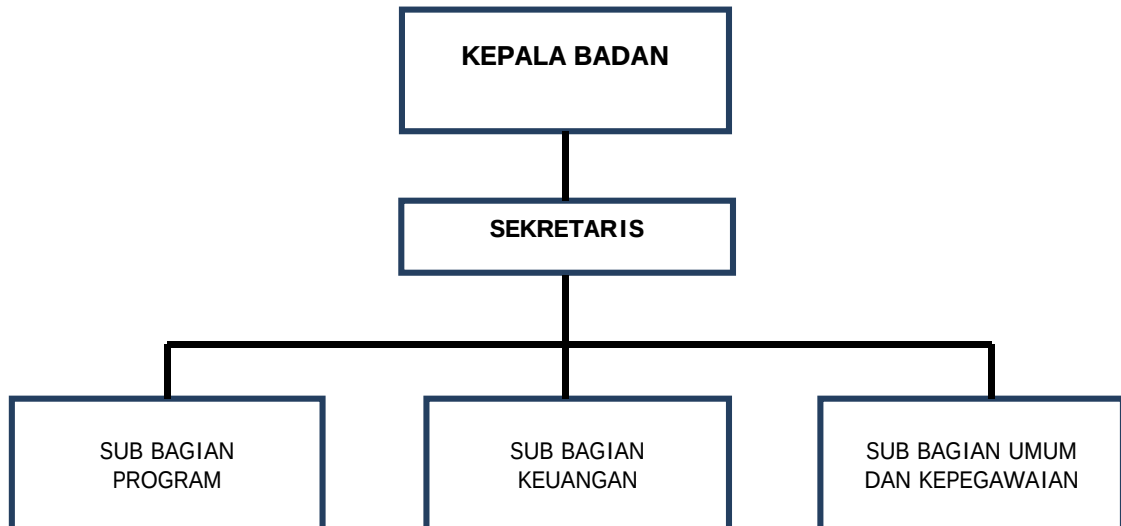
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi;
- f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Jabatan

Struktur organisasi jabatan Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sekretariat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian – sub bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 dengan sasaran sebagai berikut:

1. Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana prasarana aparatur
3. Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur
4. Terpenuhi dan terealisasinya anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Sekretaris sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja program atau kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung relevan.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretariat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sekretariat

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran yang terlayani	100%	25%	50%	75%	100 %	100%
	1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan penyediaan surat menyurat dan materai	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	3) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan asuransi Barang Milik Daerah	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	Jumlah pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana prasarana aparatur	100%	25%	50%	75%	100 %	100%
	1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	2) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	5) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	6) Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Jumlah penuhi Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
	8) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang ditingkatkan kompetensinya	100%	0%	35,38%	75,38%	100 %	100%
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fornal	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	130 orang	-	46 orang	98 orang	130 orang	130 orang
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase pemenuhan dan realisasi anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	100%	18%	45%	63%	100 %	100%
	1) Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi/Pelaporan	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	3 dokumen
	2) Kegiatan Media Informasi Diklat	- Jumlah Warta Diklat dan Jurnal Kediklatan yang terbit - Jumlah leaflet yang dicetak - Jumlah peserta pameran inovasi kepemimpinan - Jumlah laporan pameran PRPP	- 2 edisi - 5055 lembar - 48 orang - 1 dok		2 edisi	5055 lbr	2 edisi	- 2 edisi - 5055 lembar - 48 orang - 1 dok

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
	3) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis
	<i>Rata-rata capaian</i>							100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Sekretariat dari 4 program dengan indikator, yaitu : (1) terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran; (2) meningkatnya sarana prasarana aparatur; (3) meningkatnya kompetensi SDM Aparatur; (4) terpenuhi dan terealisasinya anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dilaksanakan melalui 24 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% atau “Baik” dengan kategori “A”.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretariat, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018

No	Program / Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Langsung terdiri:	24.526.417.000	23.030.842.232	93,90
1	Terselenggaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan sasaran:	10.876.736.000	9.696.552.947	89,15
	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			
2	Terselenggaranya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan sasaran:	12.076.483.000	11.904.740.185	98,58
	Meningkatnya sarana prasarana aparatur			
3	Terselenggaranya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sasaran:	482.000.000	466.017.249	96,68
	Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur			
4	Terselenggaranya Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan sasaran:	1.091.198.000	963.531.851	88,30
	Terpenuhi dan terealisasinya anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah			
Rata-rata penyerapan anggaran				93,90%

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk 4 (empat) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 24.526.417.000,00 terealisasi sebesar Rp 23.030.842.232,00 dan Capaian Kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 1.495.574.768,00 atau 6,09%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda dalam peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan aset dan pengadministrasian keuangan;
2. Melakukan identifikasi agar program pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur dapat berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan;
3. Peningkatan koordinasi perencanaan penganggaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitan dan Pengembangan Daerah untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan perencanaan penganggaran;
4. Melakukan pengendalian internal instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 93,90 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi sebesar Rp 1.495.574.768,00 atau 6,09%.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi program agar selaras dan relevan dengan sasaran dan tujuan jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
2. Evaluasi terhadap kegiatan, agar selaras dan relevan dengan program yang ada, sehingga capaian kegiatan akan menunjang capaian kinerja organisasi.

Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Drs. MOHAMAD ARIEF IRWANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680614 199001 1 001

SEKRETARIS,

HERMOYO WIDODO, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan.....	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	5
A Perjanjian Kinerja.....	5
B Capaian Kinerja.....	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	6
BAB III PENUTUP.....	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

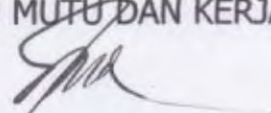
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu pengembangan kompetensi Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

SUB BIDANG
PENJAMINAN MUTU DAN KERJASAMA



MOCHAMAD SAID, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19671203 198703 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

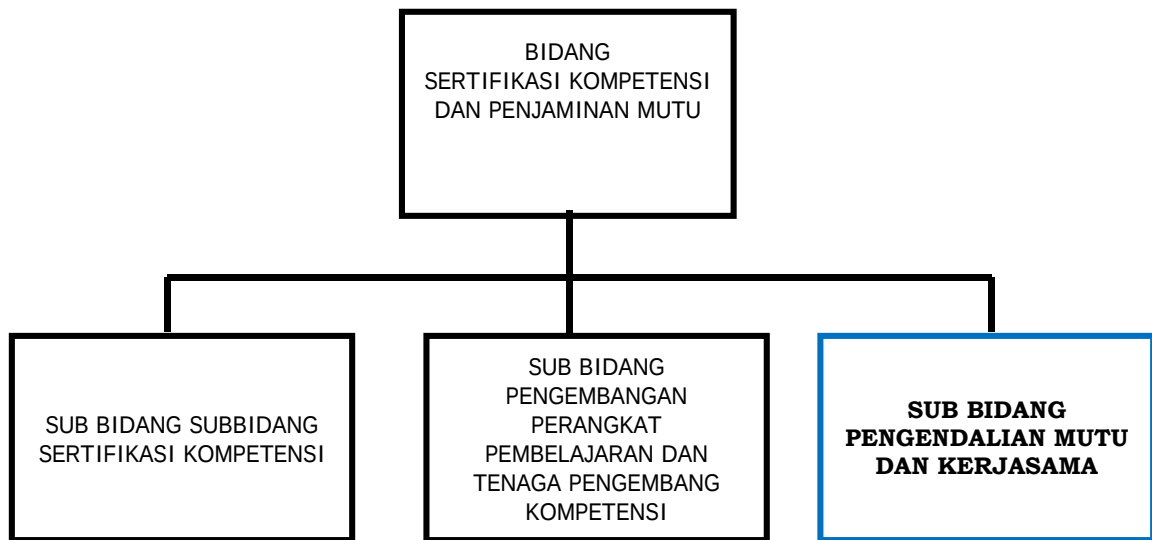
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerjasama, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerjasama;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengendalian mutu dan kerjasama;
- 3) menyiapkan bahan sertifikasi dan akreditasi;
- 4) menyiapkan bahan rekomendasi pelaksanaan kerjasama;
- 5) menyiapkan bahan pengembangan kompetensi ASN;
- 6) menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi;
- 7) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan kerjasama; dan
- 8) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat;
- 2) Reformasi Kediklatan;

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	166 dok	109	50	34	65	258 dok
2	Reformasi Kediklatan	Jumlah dokumen Reformasi Kediklatan	4 dok	-	-	-	4	4 dok
<i>Rata-rata capaian</i>								154,11 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama dari 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator rata-rata capaian kinerjanya 154.11 % atau **“Sangat Baik”**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	Jumlah dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat	166 dok	258	155.4 %	919.635.000	797.002.769	86,67 %
Kegiatan 1.2 Reformasi Kediklatan	Jumlah dokumen Reformasi Kediklatan	4 dok	4	100 %	273.645.000	206.499.400	75,46 %
					Rata – Rata		81.06 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama sebesar 154.11 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 81,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 81,06% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama **“sangat baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 189,777,831 atau sebesar 15.90 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Penyampaian laporan hasil evaluasi pra penyelenggaraan diklat, evaluasi tenaga pengajar dan evaluasi penyelenggaraan diklat kepada bidang, sekretariat dan widyaiswara.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan melalui evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan di kabupaten/kota dan alumni diklat dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang ada di kabupaten/kota.
- 3) Melakukan rapat bulanan dengan Tim Komite Penjaminan Mutu Diklat.
- 4) Melakukan rapat bulanan terkait dengan pemeliharaan ISO 9001:2015
- 5) Melakukan konsultasi akreditasi lembaga diklat ke Kementerian / Lembaga Teknis yang terkait.
- 6) Melakukan pembahasan dengan Akademisi / Praktisi dalam penyusunan pedoman / petunjuk teknis.
- 7) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 127,5 % dan anggaran sebesar 81,06 %, sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 189,777,831 atau sebesar 15.90 %.

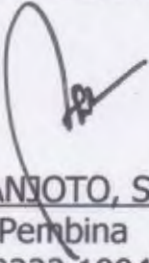
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengendalian Mutu dan Kerjasama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

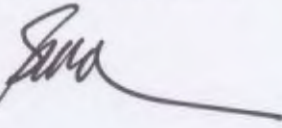
Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU



HERU SANJOTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19630222 199403 1 002

KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN
MUTU DAN KERJASAMA



MOCHAMAD SAID, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19671203 198703 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP	10
A Kesimpulan	10
B Rekomendasi	10

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Dan Tenaga Pengembang Kompetensi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN
TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI

TONY AGUS BUDIYANTO, S.SO,M.SI

Pembina

NIP. 19690810 198903 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi;
- 3) menyiapkan bahan pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi;
- 4) menyiapkan bahan pengembangan perangkat pembelajaran;
- 5) menyiapkan bahan pengembangan sumber belajar;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perangkat pembelajaran dan tenaga pengembang kompetensi; dan
- 7) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Dan Tenaga Pengembang Kompetensi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat;
- 2) Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara.

Secara lengkap Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	Jumlah dokumen Pengkajian dan Pengembangan	83 dok	0 dok	48 dok	15 dok	20 dok	83 dok
2	Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	Jumlah dokumen Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswara	8 dok	0	2	4	2	8 dok
<i>Rata-rata capaian</i>								100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi dari 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100 % atau **“Baik”**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat	Jumlah dokumen Pengkajian dan Pengembangan	83 dok	83 dok	100%	786.673.000	749.817.650	95,32 %
Kegiatan Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyaiswar	Jumlah dokumen Pengembangan Standarisasi dan Profesionalisme Widyai swara	8 DOK	8 DOK	100%	526.412.000	446.214.641	84,77 %
					Rata – rata		95.02 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 95.02 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah memenuhi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 95,02% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi **“baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 117.052.709 atau sebesar 4.98 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan BPSDMD, OPD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Kabupaten Kota terkait dengan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Diklat;
- 2) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100 % dan anggaran sebesar 95,02 %, sehingga dapat dikategorikan **“Baik”** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 117.052.709 atau sebesar 4.98 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Perangkat Pembelajaran Dan Tenaga Pengembang Kompetensi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPTENSI DAN PENJAMINAN MUTU

HERU SANJOTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19630222 199403 1 002

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
PERANGKAT PEMBELAJARAN DAN TENAGA
PENGEMBANG KOMPETENSI PEGAWAI

TONY AGUS BUDIYANTO, S.SO,M.SI
Pembina
NIP. 19690810 198903 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	4
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	5
A Perjanjian Kinerja	5
B Capaian Kinerja	5
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	7
BAB III PENUTUP	8
A Kesimpulan	8
B Rekomendasi	8

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

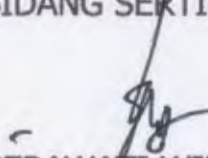
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

KEPALA SUB BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI


DRA. HERAWATI WIDYARINI, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19690817 199603 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

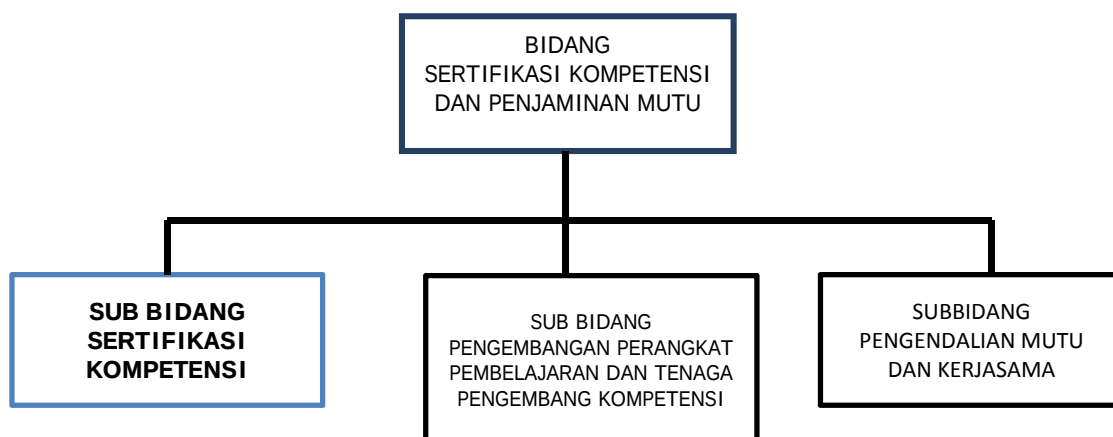
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi pada Bidang Sertifikasi Kompetensi dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sertifikasi kompetensi, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kompetensi;
- 2) menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang Sertifikasi Kompetensi;
- 3) menyiapkan bahan pengelolaan perangkat sertifikasi kompetensi ASN;
- 4) menyiapkan bahan sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi kompetensi; dan
- 6) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 yaitu Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Aparatur Sipil Negara. Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensinya	280 orang	0	112 orang	245 orang	281 orang	281 org
<i>Rata-rata capaian</i>								100.36 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi 281 orang dengan capaian 100.36 % atau **Sangat Baik**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensinya	100 %	100.36 %	100 %	606.563.000	519.407.940	85,63 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi sebesar 100,36 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 85,63 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 85,63 % tersebut artinya kinerja Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi “**sudah baik**” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 87.155.060 atau sebesar 14,34 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Peningkatan koordinasi lintas sub bidang dan bidang di lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan OPD Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Sertifikasi Kompetensi ASN;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan OPD Kabupaten / Kota di Jawa Tengah terkait Uji Kompetensi yang efektif dan efisien dan terintegrasi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100,36 % dan anggaran sebesar 85,63 % sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 87.155.060 atau sebesar 14,34 %

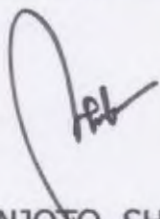
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

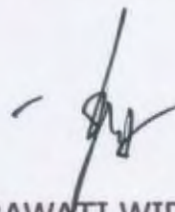
Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI DAN PENJAMINAN MUTU



HERU SANJOTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19630222 199403 1 002

KEPALA SUB BIDANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI



DRA. HERAWATI WIDYARINI, MM
Penata Tingkat I
NIP. 19690817 199603 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A Tugas Jabatan	4
B Struktur Jabatan.....	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	6
A Perjanjian Kinerja.....	6
B Capaian Kinerja.....	6
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	8
BAB III PENUTUP.....	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi.....	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Kompetensi Teknis Inti sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Laporan Kinerja Pengawasan Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti sebagaimana terdiri dari :

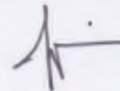
1. Pendahuluan, yang meliputi Tugas Jabatan dan Struktur Jabatan;
2. Akuntabilitas Kinerja Jabatan, yang meliputi Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi;
3. Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan

Kompetensi Teknis Inti pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS INTI



Dra. RIKA WIDJAYANTI, M.Hum

Pembina

NIP. 19651015 199103 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

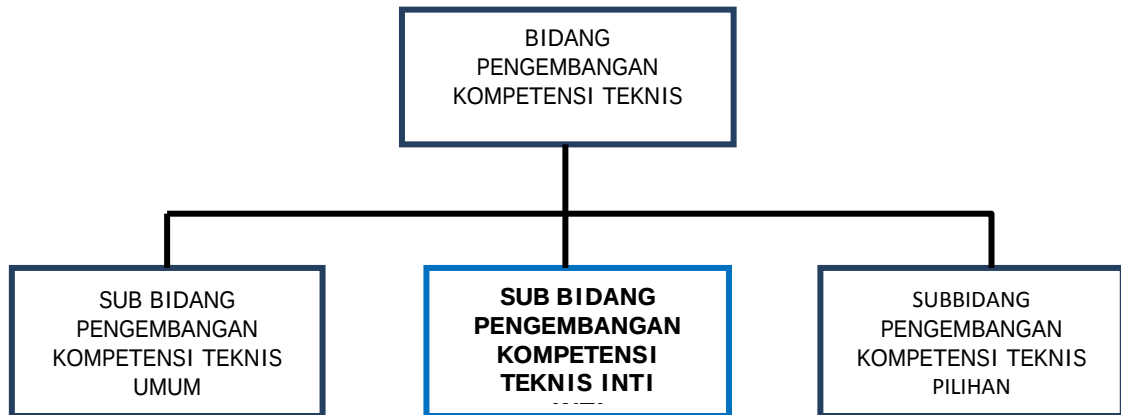
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis inti;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan teknis inti;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis inti;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi teknis inti;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis inti; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknis Inti. Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Inti	480	105	67	230	70	472
<i>Rata-rata capaian</i>								98,33 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 98,33 % atau **“Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Inti	480	472	98,33 %	4.042.479.000	3.642.725.770	90,11 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti sebesar 98,33 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 90,11 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata belum memenuhi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 90,11 % tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti **“Baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 399.753.230,- atau sebesar 9,89 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Penyusunan perencanaan
- 2) Peningkatan koordinasi lintas OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Jawa Tengah.
- 3) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 98,33 % dan anggaran sebesar 90,11 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 399.753.230,- atau sebesar 9,89 %.

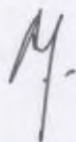
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

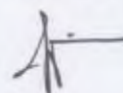
Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



ANDIK ARIEF ASYAFII, SH, MM
Pembina
NIP. 19651109 198703 1 010

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
TEKNIS INTI



Dra. RIKA WIDJAYANTI, M.Hum
Pembina
NIP. 19651015 199103 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A Tugas Jabatan	4
B Struktur Jabatan.....	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	6
A Perjanjian Kinerja.....	6
B Capaian Kinerja.....	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	9
BAB III PENUTUP.....	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi.....	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

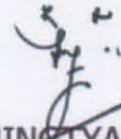
Laporan Kinerja Pengawasan Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan sebagaimana terdiri dari :

1. Pendahuluan, yang meliputi Tugas Jabatan dan Struktur Jabatan;
2. Akuntabilitas Kinerja Jabatan, yang meliputi Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi;
3. Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN



V.W. AGUSTININGSIYAS, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19700817 199503 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

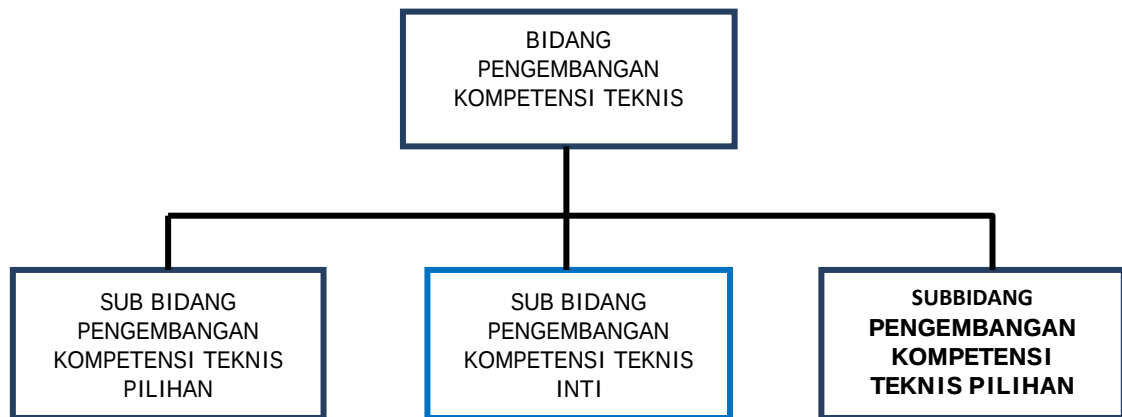
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis Pilihan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan teknis Pilihan;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis Pilihan;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi teknis Pilihan;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis Pilihan; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan pada Bidang pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pilihan. Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Pilihan	430	33	72	92	211	408
	<i>Rata-rata capaian</i>							94,88 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 96,04 % atau **“Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Pilihan	430	408	94,88 %	2.196.420.000	1.855.565.735	84,48 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan sebesar 96,04 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 84,48 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata belum memenuhi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 84,48 % tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan **“baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 340.854.265,- atau sebesar 15,52 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi lintas OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Jawa Tengah.
- 2) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 96,04 % dan anggaran sebesar 84,48 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 340.854.265,- atau sebesar 15,52 %.

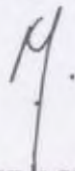
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

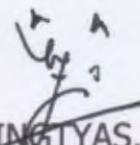
Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



ANDIK ARIEF ASYAFII, SH, MM
Pembina
NIP. 19651109 198703 1 010

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS PILIHAN



V.W. AGUSTININGTYAS, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19700817 199503 2 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A Tugas Jabatan	4
B Struktur Jabatan.....	5
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	6
A Perjanjian Kinerja.....	6
B Capaian Kinerja.....	8
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	9
BAB III PENUTUP.....	9
A Kesimpulan	9
B Rekomendasi.....	9

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam Pengembangan Kompetensi Teknis Umum sumber daya manusia ASN di Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Laporan Kinerja Pengawasan Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum sebagaimana terdiri dari :

1. Pendahuluan, yang meliputi Tugas Jabatan dan Struktur Jabatan;
2. Akuntabilitas Kinerja Jabatan, yang meliputi Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja dan Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi;
3. Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Rekomendasi.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM



JATI WIYONO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19630606 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

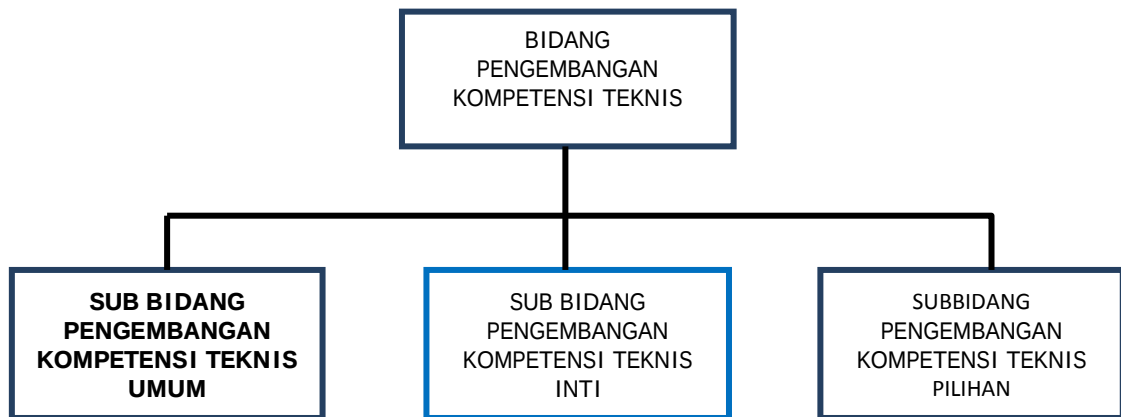
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi teknis umum;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pengembangan teknis umum;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi teknis umum;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis umum; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum. Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Umum	462	125	157	68	105	455
	<i>Rata-rata capaian</i>							98,48 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 98,48 % atau **“Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Diklat Teknis Umum	462	455	98,48 %	2.852.742.000	2.518.903.740	88,29 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum sebesar 98,48 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 88,29 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata belum memenuhi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 88,29 % tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum **“baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 333.838.260 atau sebesar 11,71 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi lintas OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Jawa Tengah.
- 2) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 98,48 % dan anggaran sebesar 88,29 %, sehingga dapat dikategorikan **“Baik”** artinya capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 333.838.260,- atau sebesar 11,71 %.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM

ANDIK ARIEF ASYAFII, SH, MM
Pembina
NIP. 19651109 198703 1 010

JATI WIYONO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19630606 199311 1 001

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 98,48 % dan anggaran sebesar 88,29 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 333.838.260,- atau sebesar 11,71 %.

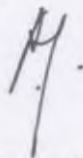
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Semarang, Maret 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS



ANDIK ARIEF ASYAFII, SH, MM
Pembina
NIP. 19651109 198703 1 010

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI TEKNIS UMUM



JATI WIYONO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19630606 199311 1 001

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional

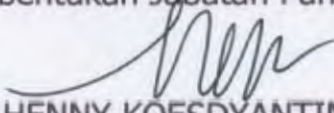
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019
Sub Bidang Pelatihan
Pembentukan Jabatan Fungsional

Dra. HENNY KOESDYANTINI, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19630519 198902 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

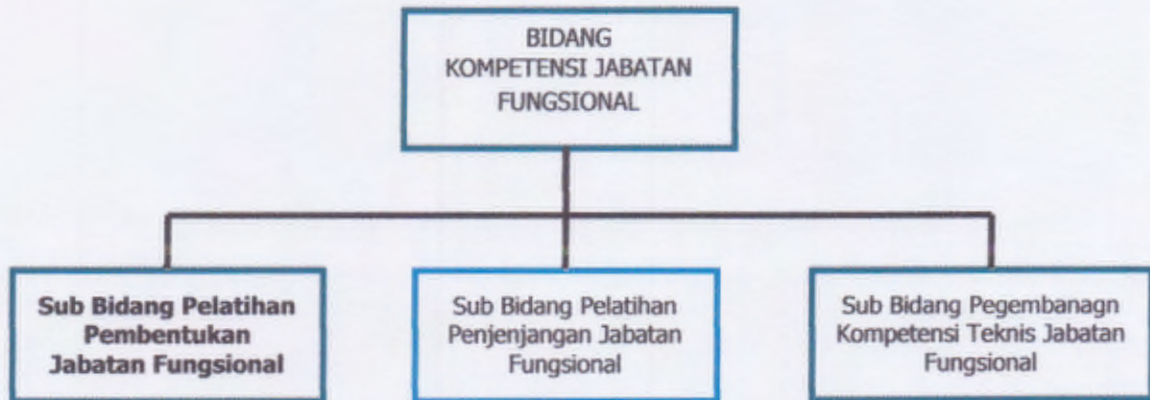
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, yang meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- e. Menyiapkan bahan kerjasama Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINEJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB;
- 2) Pelatihan Penguatan Bagi Kepala Sekolah SMU/SMK;
- 3) Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi Pengawas Sekolah SMU/SMK;
- 4) Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam;
- 5) Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dalam Penganggulangan Kemiskinan.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	35 peserta	0	0	0	100 %	100%
2	Pelatihan Penguatan Bagi Kepala Sekolah SMU/SMK.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Penguatan Bagi Kepala Sekolah SMU/SMK.	30 peserta	0	0	54,5%	54,5%	109%
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi Pengawas Sekolah SMU/SMK.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi Pengawas Sekolah SMU/SMK.	70 peserta	0	0	50%	50%	100%
4	Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam	35 peserta	100%	0	0	0	100%
5	Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dalam Penganggulungan Kemiskinan.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dalam Penganggulungan Kemiskinan.	60 peserta	50%	50%	0	0	100%
Rata-rata capaian								109%

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional dari 5 (lima) kegiatan dengan 5 (lima) indikator rata-rata capaian kinerjanya 109% atau **"Sangat Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Calon Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB	100%	100%	100%	318.042.000	296.627.000	93,26 %
Pelatihan Penguatan Bagi Kepala Sekolah SMU/SMK.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Penguatan Bagi Kepala Sekolah SMU/SMK.	100%	109%	109%	392.604.000	368.454.860	93,85 %
Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi Pengawas Sekolah SMU/SMK.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi bagi Pengawas Sekolah SMU/SMK.	100%	100%	100%	392.604.000	359.053.215	91,45 %
Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Pola 150 Jam	100%	100%	100%	353.815.000	332.152.690	93,87 %
Pelatihan	Jumlah ASN/PNS	100%	100%	100%	473.985.000	397.287.309	83,81%

Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dalam Penganggulungan Kemiskinan.	yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kinerja Penyuluh Sosial dalam Penganggulungan Kemiskinan.						
					1.931.050.000	1.753.575.074	

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional sebesar 109% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 91,25%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2018 rata-rata telah sesuai target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 91,25% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional **"Sangat Baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 177.474.926 atau sebesar 9,19%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Penyusunan rencana Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional melalui pelatihan calon kepala sekolah, calon pengawas lingkungan hidup, Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi melalui pemetaan kebutuhan Pelatihan Jabatan Fungsional.
- 3) Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan/ Lembaga Penyelenggaraan Diklat (LPD) bidang pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 109% dan anggaran sebesar 91,25%, sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 177.474.926 atau sebesar 9,19%.

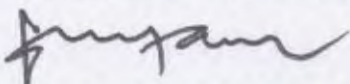
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

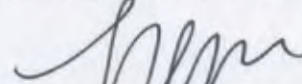
1. Tindak lanjut pasca penyerahan SDM bidang pendidikan (guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah) adalah mengembangkan dan meningkatkan kompetensi wajib yang harus dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Perlu diselenggarakan pelatihan Training Of Trainer (TOT) bagi Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan, sekaligus untuk memperkuat lembaga BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang terakreditasi dalam pelatihan di bidang pendidikan.
3. Evaluasi terhadap pelatihan pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan tuntutan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semarang, 2019

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGA
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL


Drs. DAVID BUDI HANTORO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610601 198810 1 001

KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN
PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL


Dra. HENNY KOESDYANTINI, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19630519 198902 2 001

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

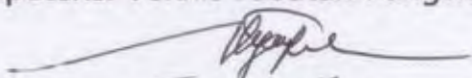
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatanandengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019

Sub Bidang Pelatihan Pengembangan
Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional


ACHDIAR MOH. SYAIFUL, SH, MM
Pembina / IVa
NIP. 19651216 198809 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

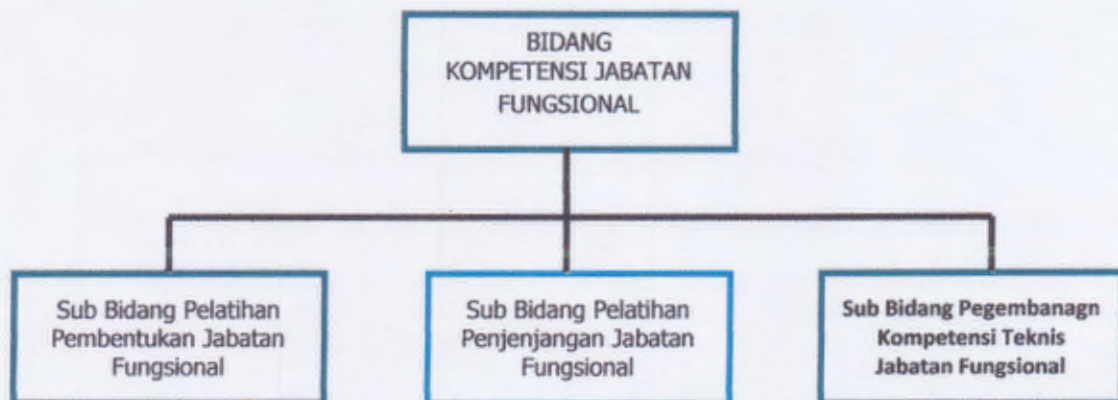
Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pelaksanaan tugas untuk penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional, yang meliputi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- e. Menyiapkan bahan kerjasama Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINEJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Distric Food Inspector (Pengawas Pangan Daerah)
- 2) Pelatihan Fungsional Kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian
- 3) Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan
- 4) Pelatihan Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian berbasis Partisipasif bagi Penyuluh Pertanian
- 5) Pelatihan Surveilans Kesehatan
- 6) Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman
- 7) Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelatihan Distric Food Inspector (Pengawas Pangan Daerah)	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Distric Food Inspector (Pengawas Pangan Daerah)	30 peserta	100%	0	0	0	100%
2	Pelatihan Fungsional Kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian	60 peserta	50%	0	0	50%	100%
3	Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan	30 peserta	0	100%	0	0	100%
4	Pelatihan Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian berbasis Partisipasif bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian berbasis Partisipasif bagi Penyuluh Pertanian	30 peserta	0	0	100%	0	100%
5	Pelatihan Surveilans Kesehatan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Surveilans Kesehatan	30 peserta	0	0	100%	0	100%

6	Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman	30 peserta	0	0	100%	0	100%
7	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan	30 peserta	0	0	0	100%	100%
Rata-rata capaian								100%

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional dari 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100 % atau **"Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran(*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pelatihan Distric Food Inspector (Pengawas Pangan Daerah)	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Distric Food Inspector (Pengawas Pangan Daerah)	100%	100%	100%	222.285.000	203.498.640	91,55 %
Pelatihan Fungsional Kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Kewirausahaan bagi Penyuluh Pertanian	100%	100%	100%	465.484.000	415.335.367	89,23 %
Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan	100%	100%	100%	235.603.000	210.516.506	89,35 %
Pelatihan Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian berbasis Partisipasif bagi Penyuluh Pertanian	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Fungsional Pengembangan Metodologi Pertanian berbasis Partisipasif bagi Penyuluh Pertanian	100%	100%	100%	275.862.000	238.448.904	86,44%

Pelatihan Surveilans Kesehatan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Surveilans Kesehatan	100%	100%	100%	234.969.000	220.974.810	94,04%
Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	222.430.000	206.149.106	92,68%
Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan	100%	100%	100%	332.864.450	276.727.065	83,14%
					1.989.497.450	1.771.650.398	

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional sebesar 100% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 89,49%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2018 rata-rata telah sesuai target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 89,49% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional **"Sangat Baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 217.847.052 atau sebesar 10,51%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja.

Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Penyusunan rencana pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional melalui pelatihan *District Food Inspector* (pengawas Pangan Daerah), Petugas Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji, pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan, Pelatihan Pengembangan Metodologi Pertanian Berbasis Partisipatif Bagi Penyuluh Pertanian dan Kewirausahaan Bagi Penyuluh Pertanian.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi melalui pemetaan kebutuhan pelatihan jabatan fungsional.
- 3) Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan/ Lembaga Penyelenggaraan Diklat (LPD) sektoral.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

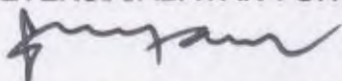
Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 89,49%, sehingga dapat dikategorikan **"Sangat Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 217.847.052 atau sebesar 10,51%

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

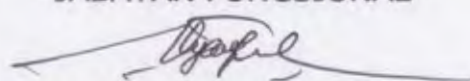
1. Dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan tersedianya Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji yang setiap tahun diselenggarakan maka perlu diselenggarakan Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji yang berasal dari instansi terkait di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
2. Bahwa program Pelatihan Petugas Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji untuk diprogramkan kembali Tahun 2020 mengingat program ini baru dilaksanakan 1x pada Tahun 2019 dimana Kabupaten/ Kota masih banyak membutuhkan pelatihan ini.
3. Evaluasi terhadap pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional sesuai dengan tuntutan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mengetahui
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL



Drs. DAVID BUDI HANTORO, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19610601 198810 1 001

Semarang, 2019
KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL



ACHDIAR MOH. SYAIFUL, SH, MM
Pembina / IVa
NIP. 19651216 198809 1 001

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP.....	17
A Kesimpulan	17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

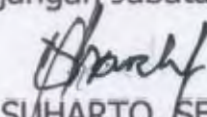
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019

Sub Bidang Pelatihan
Penjenjangan Jabatan Fungsional


SUHARTO, SE, M.Si
Pembina / IVa

NIP. 19680610 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

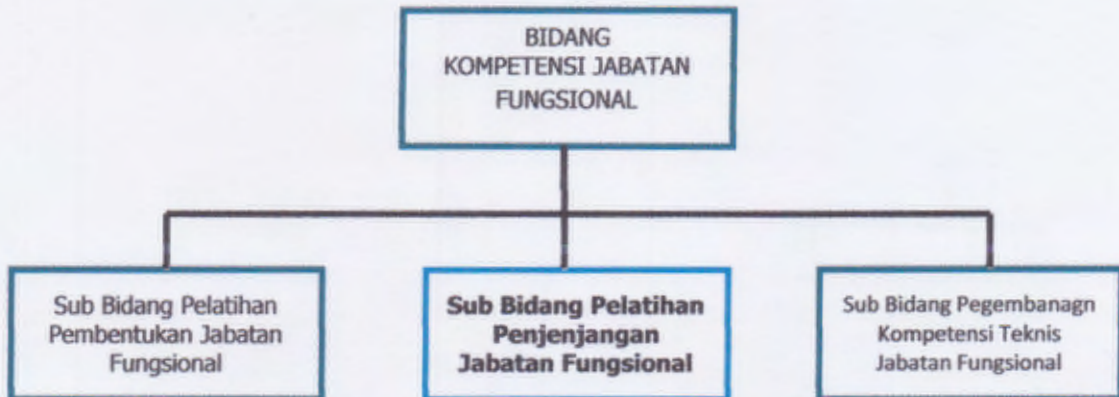
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional, yang meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- e. Menyiapkan bahan kerjasama Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINEJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli;
- 2) Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli;
- 3) Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli;
- 4) Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli;
- 5) Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli;
- 6) Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil;
- 7) Training of Trainers Pimpemdagri.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	60 peserta	50 %	0	50%	0	100%
2	Pelatihan Fungsional Dasar Penyuluh Pertanian Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli.	30 peserta	100%	0	0	0	100%
3	Pelatihan Fungsional Jabatan Sanitarian Jenjang Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli.	60 peserta	0	50%	0	50%	100%
4	Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli.	30 peserta	0	0	100%	0	100%
5	Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli.	30 peserta	0	0	100%	0	100%

6	Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	30 peserta	0	0	0	100%	100%
7	Training of Trainers Pimpemdagri.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Training Of Trainers Pimpemdagri.	30 peserta	0	0	0	100%	100%
<i>Rata-rata capaian</i>								100%

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional dari 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **"Sangat Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran(*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	100%	100%	100%	487.498.000	445.856.000	91,46 %
Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli	100%	100%	100%	356.962.000	328.714.274	92,09 %
Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli	100%	100%	100%	479.604.000	442.136.500	92,19 %
Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli	100%	100%	100%	250.207.000	234.919.700	93,90%
Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli	100%	100%	100%	245.022.000	221.644.490	90,46%

Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	100%	100%	100%	244.604.000	228.560.800	93,44%
Training Of Trainers Pimpemdagri	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Training Of Trainers Pimpemdagri	100%	100%	100%	244.604.000	218.051.650	89,14%
					2.308.501.000	2.119.883.414	

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional sebesar 100% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 91,18%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2018 rata-rata telah sesuai target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 91,18% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional **"Sangat Baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 188.617.586 atau sebesar 8,82%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Penyusunan rencana Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional melalui Pelatihan TOT Orientasi Dewan, Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Jenjang Madya, TOT Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru, Bidan Jenjang Ahli Pertama, Sanitarian Jenjang Ahli Pertama dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi melalui pemetaan kebutuhan Pelatihan Jabatan Fungsional.
- 3) Menjalin kerjasama dengan Kementerian /Lembaga Penyelenggaraan Diklat (LPD) sektoral.

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP.....	17
A Kesimpulan	17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional

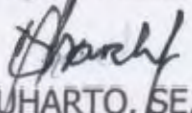
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019
Sub Bidang Pelatihan
Penjenjangan Jabatan Fungsional

SUHARTO, SE, M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19680610 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

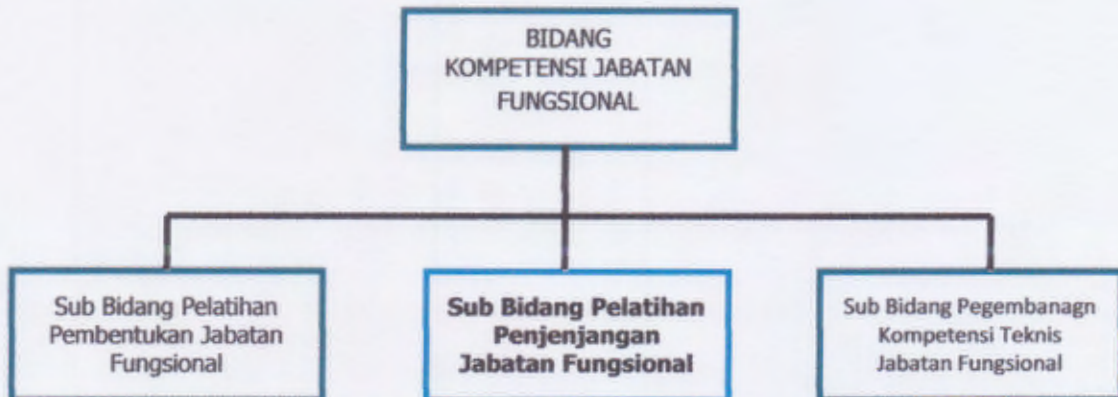
A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas pelaksanaan tugas untuk menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional, yang meliputi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- c. Menyiapkan bahan penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- e. Menyiapkan bahan kerjasama Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINEJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli;
- 2) Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli;
- 3) Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli;
- 4) Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli;
- 5) Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli;
- 6) Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil;
- 7) Training of Trainers Pimpemdagri.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	60 peserta	50 %	0	50%	0	100%
2	Pelatihan Fungsional Dasar Penyuluh Pertanian Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli.	30 peserta	100%	0	0	0	100%
3	Pelatihan Fungsional Jabatan Sanitarian Jenjang Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli.	60 peserta	0	50%	0	50%	100%
4	Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli.	30 peserta	0	0	100%	0	100%
5	Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli.	30 peserta	0	0	100%	0	100%

6	Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	30 peserta	0	0	0	100%	100%
7	Training of Trainers Pimpemdagri.	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Training Of Trainers Pimpemdagri.	30 peserta	0	0	0	100%	100%
	Rata-rata capaian							100%

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional dari 7 (tujuh) kegiatan dengan 7 (tujuh) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **"Sangat Baik "**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran(*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat Jenjang Ahli	100%	100%	100%	487.498.000	445.856.000	91,46 %
Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli	100%	100%	100%	356.962.000	328.714.274	92,09 %
Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Ahli	100%	100%	100%	479.604.000	442.136.500	92,19 %
Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Jenjang Ahli	100%	100%	100%	250.207.000	234.919.700	93,90%
Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Nutritionis Jenjang Ahli	100%	100%	100%	245.022.000	221.644.490	90,46%

Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Sanitarian Jenjang Terampil	100%	100%	100%	244.604.000	228.560.800	93,44%
Training Of Trainers Pimpemdagri	Jumlah ASN/PNS yang Mengikuti Training Of Trainers Pimpemdagri	100%	100%	100%	244.604.000	218.051.650	89,14%
					2.308.501.000	2.119.883.414	

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional sebesar 100% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 91,18%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2018 rata-rata telah sesuai target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 91,18% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional **"Sangat Baik"** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 188.617.586 atau sebesar 8,82%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Penyusunan rencana Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional melalui Pelatihan TOT Orientasi Dewan, Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Jenjang Madya, TOT Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru, Bidan Jenjang Ahli Pertama, Sanitarian Jenjang Ahli Pertama dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli.
- 2) Peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi melalui pemetaan kebutuhan Pelatihan Jabatan Fungsional.
- 3) Menjalin kerjasama dengan Kementerian /Lembaga Penyelenggaraan Diklat (LPD) sektoral.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 91,18%, sehingga dapat dikategorikan **"Sangat Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 188.617.586 atau sebesar 8,82%.

B. Rekomendasi

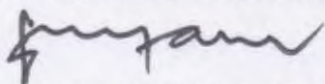
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu diselenggarakan pelatihan Training Of Trainer (TOT) bagi Widyaaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan pejabat struktural untuk menjadi tenaga pengajar dalam pelatihan singkat bagi anggota dewan.
2. Evaluasi terhadap pelatihan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional sesuai dengan tuntutan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Semarang, 2019

Mengetahui

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

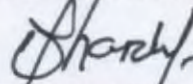


Drs. DAVID BUDI HANTORO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610601 198810 1 001

KEPALA SUB BIDANG PELATIHAN
PENJENJANGAN JABATAN FUNGSIONAL



SUHARTO, SE, M.Si

Pembina / IVa

NIP. 19680610 199803 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI-----	1
DAFTAR TABEL-----	2
DAFTAR GAMBAR-----	3
KATA PENGANTAR-----	4
BAB I PENDAHULUAN-----	5
A Tugas Jabatan-----	5
B Struktur Jabatan-----	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN-----	7
A Perjanjian Kinerja-----	7
B Capaian Kinerja-----	7
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi-----	10
BAB III PENUTUP-----	12
A Kesimpulan-----	12
B Rekomendasi-----	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Perangkat Daerah

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja -----	8
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah -----	9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost per outcome</i>) -----	10

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah -----	6

KATA PENGANTAR

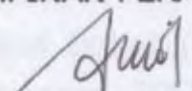
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PIMPINAN PERANGKAT DAERAH


ARI DHAMAYANTI, M.Psi

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19781119 201001 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah pada Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pimpinan Perangkat Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi pimpinan Perangkat Daerah;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 3) Menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah;
- 6) Melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	100% (150 orang)	20% (30 orang)	40% (60 orang)	80% (120 orang)	100% (150 orang)	100% (150 orang)
<i>Rata-rata capaian</i>								100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah dari 1 (satu) kegiatan dengan 1 (satu) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **“Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah	150 orang	150 orang	100%	1.313.260.000	1.241.741.746	94,55%

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah sebesar 100% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 94,55%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 94,55% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah termasuk dalam kategori **“baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 71.518.254,00 atau sebesar 5,45%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Berkonsultasi intensif dengan instansi Pembina (Kemendagri dan Kemendes), menyusun kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi, berkoordinasi dengan Biro Organisasi mengenai kewenangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan pelatihan Non ASN, utamanya Kepala Desa.
- 2) Memperkuat koordinasi dengan Dispermasdes Provinsi /Kabupaten/Kota, menekankan urgensi pelatihan Kepala Desa.
- 3) Memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota menekankan urgensi Pelatihan Lurah untuk mendukung kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan integritas.
- 4) Melakukan analisa kebutuhan pelatihan Kepala Desa, Lurah, dan Camat sekaligus mengidentifikasi calon peserta Pelatihan Kepala Desa, Lurah, dan Camat dari Kabupaten/Kota.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 94,55%, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 71.518.254,00 atau sebesar 5,45%.

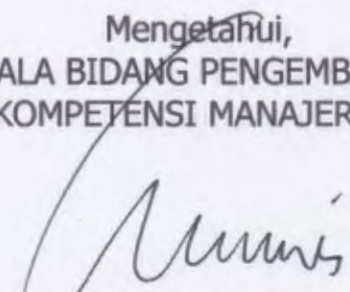
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Perangkat Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

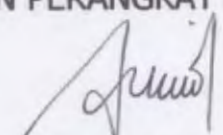
1. Perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi intensif dengan instansi pembina untuk penyusunan kurikulum pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi.
2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Instansi terkait (Biro Organisasi dan Dispermades) dalam penegasan kewenangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk penyelenggaraan Pelatihan bagi Non ASN dan penekanan mengenai urgensi Pelatihan Kepala Desa.
3. Perlu dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan analisa kebutuhan pelatihan dan identifikasi calon peserta pelatihan.

Semarang,

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780410 199703 1 005

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH


ARI DHAMAYANTI, M.Psi
Penata Tingkat I
NIP. 19781119 201001 2 008

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI-----	1
DAFTAR TABEL-----	2
DAFTAR GAMBAR-----	3
KATA PENGANTAR-----	4
BAB I PENDAHULUAN-----	5
A Tugas Jabatan-----	5
B Struktur Jabatan-----	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN-----	7
A Perjanjian Kinerja-----	7
B Capaian Kinerja-----	7
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi-----	10
BAB III PENUTUP-----	12
A Kesimpulan-----	12
B Rekomendasi-----	12

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan Jabatan Tinggi dan Jabatan Administrator

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rentang Pengukuran Capaian Kinerja -----	8
Tabel 2.2 Pengukuran Kinerja Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator -----	9
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>cost peroutcome</i>) -----	10

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah ----	6
--	---

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

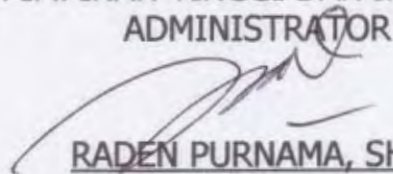
Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI DAN JABATAN
ADMINISTRATOR



RADEN PURNAMA, SH, MM
Pembina (IV/a)

NIP. 19650310 198503 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 2) Merumuskan kebijakan teknis Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 3) Menyelenggarakan pelatihan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
- 4) Melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan :							
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	100% (120 orang)	50% (60 orang)	50% (60 orang)	93,33% (112 orang)	93,33% (112 orang)	93,33% (112 orang)
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	100% (200 orang)	40% (80 orang)	80% (160 orang)	98% (196 orang)	98% (196 orang)	98% (196 orang)
	Rata-rata capaian							95,66 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) indikator sub kegiatan dengan rata-rata capaian kinerjanya 95,66% atau **“Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kepemimpinan :							
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	120 orang	112 orang	93,33%	3.377.070.000	2.943.791.919	87,17 %
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	200 orang	196 orang	98%	3.610.369.000	3.147.158.657	87,17 %
Rata-rata capaian							87,17 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator sebesar 95,66% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 87,17 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 87,17% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator “**sudah baik**” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 896.488.424 atau sebesar 12,83 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Koordinasi dengan LAN untuk mensosialisasikan sekaligus menyiapkan kompetensi tenaga pengajar;
- 2) Koordinasi intensif dengan LAN mengingat kewenangan LAN, dan juga koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi calon peserta;
- 3) Koordinasi intensif dengan LAN, Mentor, dan Instansi Pengirim;
- 4) Komitmen peserta/instansi pengirim untuk mengimplementasikan Program Perubahan (proper) yang sudah dibuat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 95,66% dan anggaran sebesar 87,17 %, sehingga dapat dikategorikan **"Baik"** artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 896.488.424 atau sebesar 12,83 %.

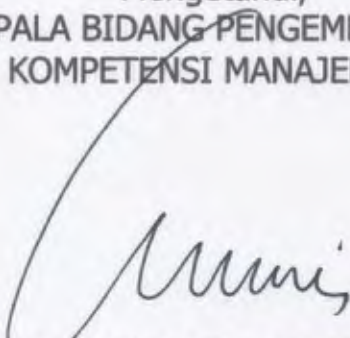
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

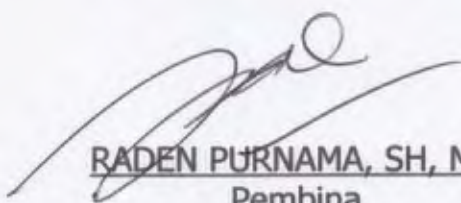
1. Perlu dilakukan koordinasi intensif dengan instansi pembina (LAN) terkait dengan tenaga pengajar dan kepesertaan.
2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota sebagai instansi pengirim terkait dengan identifikasi calon peserta pelatihan.
3. Perlu dilakukan penekanan terhadap komitmen peserta untuk implementasi hasil pelatihan atau proper yang telah dibuat.

Semarang, 2019

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19780410 199703 1 005

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN
JABATAN ADMINISTRATOR


RADEN PURNAMA, SH, MM
Pembina
NIP. 19650310 198503 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A Tugas Jabatan	3
B Struktur Jabatan.....	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	9
A Perjanjian Kinerja.....	9
B Capaian Kinerja.....	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi	12
BAB III PENUTUP.....	17
A Kesimpulan	17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub bidang Pengembangan Kompetensi
Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang,

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI KEPEMIMPINAN JABATAN
PENGAWAS DAN PELATIHAN PRAJABATAN

ANDIK ARIF ASYAFI'I, SH, MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19651109 198703 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

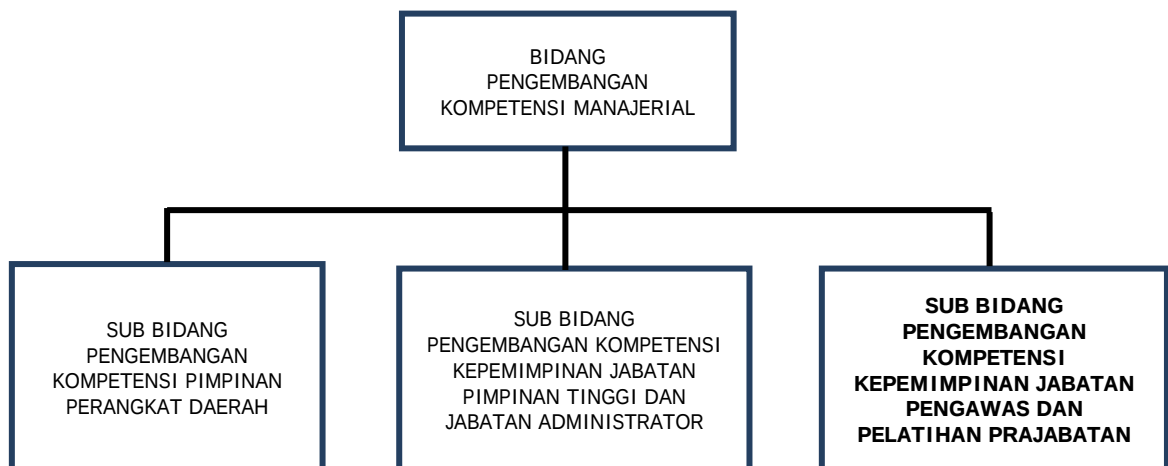
A. Tugas Jabatan

Sub bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan, yang meliputi :

- 1) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan;
- 2) Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan;
- 4) Menyiapkan bahan pengelolaan perangkat pembelajaran;
- 5) Menyiapkan bahan kerjasama pengembangan kompetensi kepemimpinan jabatan pengawas dan pelatihan prajabatan;
- 6) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan; dan
- 7) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan Tk. IV;
- 2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik

2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Pengukuran Kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan : - Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV	100% (280 orang)	28,57% (80 orang)	71,42% (200 orang)	100% (280 orang)	100% (280 orang)	100% (280 orang)
2	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	100% (1896 orang)	80,01% (1517 orang)	98,83% (1874 orang)	98,83% (1874 orang)	98,83% (1874 orang)	98,83% (1874 orang)
3	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan dengan pem. Kab/kota se jateng	Jumlah kab/kota yang di fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan	100% (52 angk)	109,61% (57 angk)	119,23% (62 angk)	125% (65 angk)	125% (65 angk)	125% (65 angk)
Rata-rata capaian								107,94%

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan dari 3 (tiga) kegiatan dengan 3 (tiga) indikator rata-rata capaian kinerjanya 107,94% atau **“Sangat Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur kepemimpinan : - Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV	Jumlah ASN/PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV	280 orang	280 orang	100%	5.045.155.000	4.397.861.613	87,17 %
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan	1896 orang	1874 orang	98,83%	3.016.280.000	2.975.526.600	98,64%
Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan dengan pem. Kab/kota se Jateng	Jumlah kab/kota yang di fasilitasi penyelenggaraan diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan pola kemitraan	52 angka tan	65 angkatan	125%	130.000.000	128.666.369	98,97%
Jumlah					8.191.435.000	7.502.054.582	
					Rata-rata		94,92 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan sebesar 107,94% dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 94,92 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 94,92% tersebut artinya kinerja Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan “**sudah baik**” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 689.380.418 atau sebesar 5,08 %.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi :

- 1) Koordinasi dengan LAN untuk mensosialisasikan sekaligus menyiapkan kompetensi tenaga pengajar;
- 2) Koordinasi intensif dengan LAN mengingat kewenangan LAN, dan juga koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk mengidentifikasi calon peserta;
- 3) Koordinasi intensif dengan LAN, Mentor, dan Instansi Pengirim;
- 4) Komitmen peserta/instansi pengirim untuk mengimplementasikan Program Perubahan (proper) yang sudah dibuat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 95,83% dan anggaran sebesar 94,92 %, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 689.380.418 atau sebesar 5,08 %.

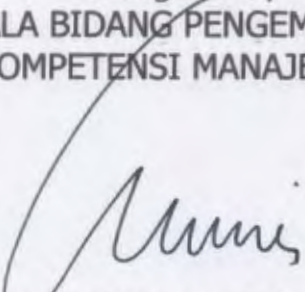
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Prajabatan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

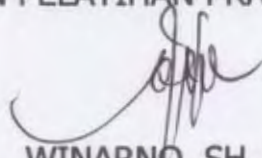
1. Perlu dilakukan koordinasi intensif dengan instansi pembina (LAN) terkait dengan tenaga pengajar dan kepesertaan.
2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota sebagai instansi pengirim terkait dengan identifikasi calon peserta pelatihan.
3. Perlu dilakukan penekanan terhadap komitmen peserta untuk implementasi hasil pelatihan atau proper yang telah dibuat.

Semarang, 2019

Mengetahui,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI MANAJERIAL


ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19780410 199703 1 005

KEPALA SUB BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN JABATAN PENGAWAS
DAN PELATIHAN PRAJABATAN


WINARNO, SH, MSI
Pembina
NIP. 19610328 198508 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan.....	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi.....	12
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17
B Rekomendasi.....	

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan

KATA PENGANTAR

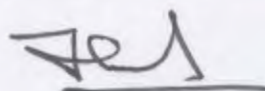
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



SODIKUN, SE, MSE, MA
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19740618 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

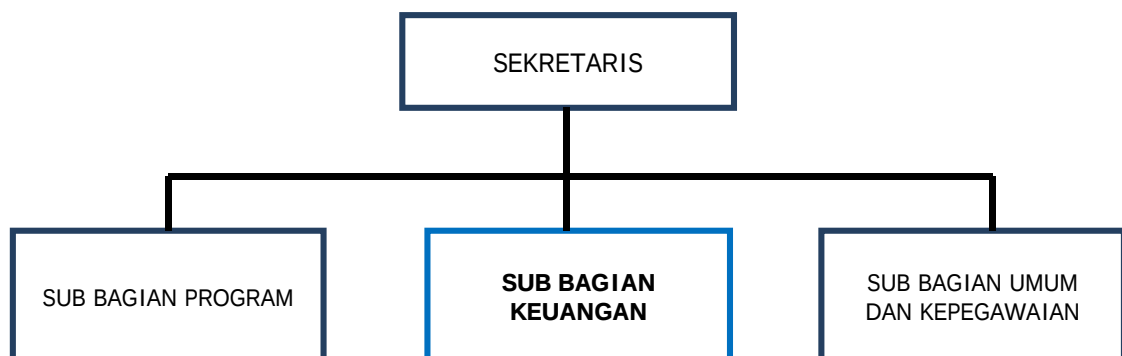
A. Tugas Jabatan

Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 2) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis di bidang keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- 4) menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dan pembukuan;
- 5) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 6) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang keuangan; dan
- 7) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 Tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan administrasi keuangan;
- 2) Pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 3) Verifikasi keuangan.

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bidang Pembinaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Pelaksanaan administrasi keuangan	1. Pemenuhan penerbitan SPP dan SPM Belanja Tidak Langsung 2. Pemenuhan penyusunan Surat Pertanggungjawaban	12 bulan 12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
2	Pembuatan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 dokumen	-	-	-	1 dok	100%
3	Verifikasi keuangan	1. Pemenuhan verifikasi dokumen pertanggungjawaban dan penerimaan 2. Pemenuhan verifikasi dokumen anggaran belanja	12 bulan 12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
<i>Rata-rata capaian</i>								100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Keuangan dari 4 (empat) kegiatan dengan 4 (empat) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **“Baik”**.

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Keuangan, bahwa untuk tahun 2018 Sub Bagian Keuangan tidak mengelola anggaran.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pengelolaan keuangan dapat selalu terjaga kelancarannya.
- 2) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100%, sehingga dapat dikategorikan "**Baik**" artinya capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan.

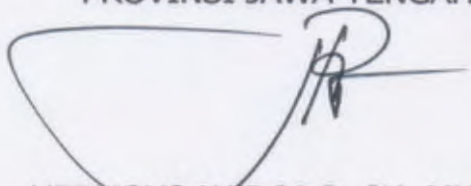
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

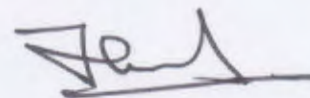
Semarang, Maret 2019

Mengetahui
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



HERMOYO WIDODO, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN



SODIKUN, SE, MSE, MA
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19740618 199511 1 001

FORMAT LAPORAN KINERJA PEJABAT PENGAWAS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR -----	2
DAFTAR ISI-----	
DAFTAR TABEL -----	
DAFTAR GAMBAR-----	
BAB I PENDAHULUAN-----	3
A Tugas Jabatan -----	3
B Struktur Jabatan-----	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN-----	9
A Perjanjian Kinerja-----	9
B Capaian Kinerja-----	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi -----	12
BAB III PENUTUP-----	17
A Kesimpulan -----	17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Program

KATA PENGANTAR

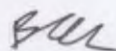
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Program pada Bidang Bidang Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan manajemen kepegawaian atau pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, 2019
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM



BUDI SANTOSO, SSTP
Penata Tingkat I
NIP. 19810730 200012 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Jabatan

Sub Bagian Program pada Kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program;
- 2) menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan badan;
- 3) menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan badan;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- 5) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan; dan
- 6) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian Program
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Program pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah;

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bagian Program sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Program pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Program

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi/Pelaporan	3 dok	1 Dok	0	1 Dok	1 Dok	100%
2	Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola	10 Jenis	10	10	10	10	100%
<i>Rata-rata capaian</i>								100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program dari 2 (dua) kegiatan dengan 2 (dua) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **“Baik”**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Program, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan 1.1 Kegiatan Peningkatan Bidang Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi/Pelaporan	3 Dok	3 Dok	100%	262.148.000	233.358.846	89,02 %
Kegiatan 1.2 Kegiatan Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah	Jumlah Sistem Informasi yang Dikelola	10 jenis	10 jenis	100%	344,277,000	273.639.385	79,48 %
Jumlah					606.425.000	506.998.231	
					Rata-rata		84,25 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Program sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 84,25 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 84,25% tersebut artinya kinerja Sub Bagian Program **“baik”** dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 99.426.769 atau sebesar 16,4%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda dalam peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan aset dan pengadministrasian keuangan;
- 2) Peningkatan koordinasi perencanaan penganggaran dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penilitan dan Pengembangan Daerah untuk meningkatkan kualitas dan pemenuhan perencanaan penganggaran
- 3) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran program dan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100% dan anggaran sebesar 84,25 %, sehingga dapat dikategorikan "**Sangat Baik**" artinya capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 99.426.769 atau sebesar 16,4%.

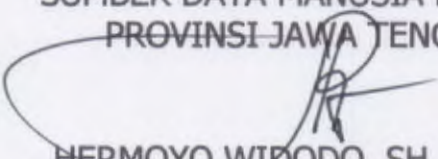
B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

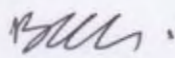
Semarang, Februari 2019

Mengetahui
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



HERMOYO WIDODO, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM



BUDI SANTOSO, SSTP
Penata Tingkat I
NIP. 19810730 200012 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	3
A Tugas Jabatan.....	3
B Struktur Jabatan	6
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	9
A Perjanjian Kinerja	9
B Capaian Kinerja	9
C Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi.....	12
BAB III PENUTUP	17
A Kesimpulan	17
B Rekomendasi.....	

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KATA PENGANTAR

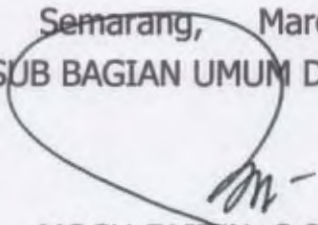
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat umumnya dan Pegawai Negeri Sipil pada khususnya bahwa Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*

Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2018, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategik 2013-2018 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Semarang, Maret 2019
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



MOCH FAIZIN, S.Sos., MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731119 1994031 005

BAB I

PENDAHULUAN

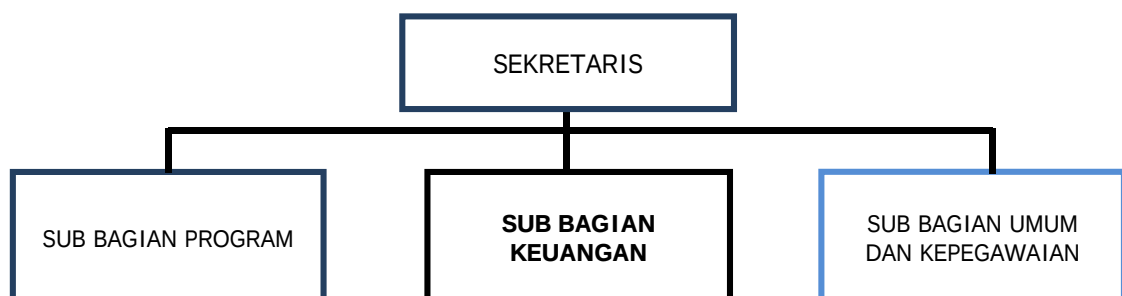
A. Tugas Jabatan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi :

- 1) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) menyiapkan bahan pengorganisasian kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan badan;
- 4) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan badan;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan badan;
- 6) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan badan;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan badan;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
- 9) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan badan; dan
- 10) melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah



Sumber : Pergub Jawa Tengah No. 84 Tahun 2016

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan, Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
- 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- 7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 11) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
- 12) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
- 13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 15) Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 16) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
- 17) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
- 18) Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
- 19) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
- 20) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
- 21) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 22) Kegiatan Media Informasi Diklat

Secara lengkap Perjanjian Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana terlampir.

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan dan didukung dengan data-data yang mendukung pencapaian program.

Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Rentang Pengukuran Capaian Kinerja

SKOR	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
2	56 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sub Bagian Keuangan

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				% Capaian
				Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan penyediaan surat menyurat dan materai	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
3	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan asuransi Barang Milik Daerah	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%

9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
11	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	Jumlah pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
14	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
15	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
16	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
17	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%

	Kantor dan Rumah Tangga	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga						
18	Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
19	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
20	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100%
21	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	130 orang	-	100	30	-	100%
22	Kegiatan Media Informasi Diklat	Jumlah Warta Diklat yang terbit Jumlah leaflet yang dicetak Jumlah peserta pameran inovasi kepemimpinan Jumlah laporan pameran PRPP	2 edisi 5055 lbr 48 orang 1 dok		5055 1	2	48	100%
Rata-rata capaian								100 %

Dari tabel 2.3 tersebut dapat diuraikan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari 22 (dua puluh dua) kegiatan dengan 22 (dua puluh dua) indikator rata-rata capaian kinerjanya 100% atau **“Baik”**

C. Kinerja Keuangan dan Rencana Aksi

c.1 Kinerja Keuangan

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DPA untuk membiayai kegiatan sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (*cost per outcome*)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan penyediaan surat menyurat dan materai	12 bulan	12 bulan	100%	6.750.000	4.321.950	64,03 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	1.940.000.000	1.662.099.732	85,68 %
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah pemenuhan asuransi Barang Milik Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	180.000.000	179.509.043	99,73 %
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	12 bulan	12 bulan	100%	2.475.775.000	2.303.303.000	93,03 %
Kegiatan Penyediaan	Jumlah pemenuhan	12 bulan	12 bulan	100%	181.013.000	180.977.800	99,98 %

Alat Tulis Kantor	penyediaan Alat Tulis Kantor						
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	150.000.000	144.718.900	96,48 %
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	142.500.000	142.010.500	99,66 %
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	100%	380.550.000	379.015.500	99,60 %
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%	44.763.000	36.945.000	82,53 %
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan	100%	200.000.000	178.108.000	89,05 %
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar	Jumlah pemenuhan Rapat-rapat Koordinasi dan	12 bulan	12 bulan	100%	517.500.000	514.256.362	99,37 %

Daerah	Konsultasi di dalam dan luar Daerah						
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	12 bulan	12 bulan	100%	4.657.885.000	3.971.287.160	85,26 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	6.277.783.700	6.271.453.300	99,90 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	100%	379.670.000	375.328.637	98,86 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	562.500.000	560.143.225	99,58 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	12 bulan	12 bulan	100%	505.000.000	504.447.050	99,89 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah	12 bulan	12 bulan	100%	337.980.000	334.880.231	99,08 %

	Tangga						
Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan	12 bulan	12 bulan	100%	18.750.000	18.280.000	97,49 %
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan	12 bulan	12 bulan	100%	588.864.400	523.412.500	88,89 %
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	3.406.102.000	3.316.795.260	97,38 %
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	130 orang	130 orang	100%	482.000.000	466.017.249	96,68 %
Kegiatan Media Informasi Diklat	Jumlah Warta Diklat yang terbit Jumlah leaflet yang dicetak Jumlah peserta pameran inovasi kepemimpinan	2 edisi 5055 lbr 48 orang	2 edisi 5055 lbr 48 orang	100%	484.773.000	456.533.620	94,17 %

	Jumlah laporan pameran PRPP	1 dok	1 dok				
Jumlah					23.920.159.100	22.523.844.019	
Rata-rata							93,92 %

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebesar 100 % dan capaian serapan anggaran rata-rata sebesar 93,92 %. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2018 rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan karena dengan capaian serapan anggaran sejumlah 84,25% tersebut artinya kinerja Sub Bagian Program “**baik**” dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.396.315.081 atau sebesar 6,08%.

c.2 Rencana Aksi

Rencana aksi dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut meliputi:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda dalam peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, pengelolaan aset dan pengadministrasian keuangan;
- 2) Melakukan identifikasi agar program pengembangan kompetensi bagi SDM Aparatur dapat berjalan lebih efektif sesuai kebutuhan;
- 3) Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisik tercapai 100%, sehingga dapat dikategorikan **"Sangat Baik"** artinya capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan perencanaan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai.
2. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi

Semarang, Maret 2019

Mengetahui
SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



HERMOYO WIDODO, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19651021 199403 1 006

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEGAWAIAAN



MOCH FAIZIN, S.Sos., MM
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731119 1994031 005